

TANTANGAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI *PROXI WAR* DI ERA GLOBALISASI

Oleh :

KH. M. Cholil Nafis, Lc. Ph D¹

Mukaddimah

Pasca perang dunia II tak lagi populer perang konvensional antara dua negara atau lebih yang langsung berhadapan. Tetapi perang strategi untuk mengalahkan dan mengambil kekayaan negara lain tetap terus berlanjut. Masing-masing negara maju dan berkembang ingin menguasai sumberdaya negara lain untuk mempertahankan ekonomi dan stabilitas nasionalnya. Kondisi inilah yang sering memicu negara untuk menyerang negara kaya sumberdaya alam dengan menggunakan kekuatan ketiga. Inilah yang disebut perang proksi (*proxy war*).

Perang Proxy adalah sebuah konfrontasi antar dua negara yang menggunakan pemain pengganti untuk menghindari perang secara langsung yang beresiko pada kehancuran total. Aktor non negara kekerasan dan tentara bayaran, pihak ketiga lainnya sering digunakan. Diharapkan bahwa kelompok ini bisa menyerang lawan tanpa menggunakan perang skala penuh atau Perang Frontal. Biasanya perang Proksi berfungsi dengan baik selama perang dingin, karena mereka menjadi kebutuhan dalam melakukan konflik bersenjata setidaknya antara dua pihak yang berperang sambil terus perang dingin.

Sifat dan karakteristik perang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. Terjadinya perang konvensional antar dua negara dewasa ini kemungkinannya kecil. Namun adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang jenis baru seperti Perang Proxy, Perang Hibrida dan Perang Asimetris. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil. Namun juga bisa Non State Actors yang dapat berupa LSM, Ormas, Kelompok masyarakat atau perorangan. Melalui perang Proksi ini tidak diketahui dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan Nonstate Actor dari jauh.

¹ Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat

Konflik-konflik di belahan dunia terjadi akibat persaingan kepentingan antar negara untuk menguasai sumber energi. Salah satu contohnya, invasi Iraq ke Kuwait pada 2 Agustus 1990 merupakan jalan pintas memulihkan ekonomi Iraq akibat turunnya harga minyak dipasaran Internasional. Amerika Serikat mengkhawatirkan situasi itu akan menggoyang harga minyak dunia dan mengganggu pasokan minyak ke negaranya. Dengan berbagai dalih akhirnya Amerika melakukan Invasi ke Iraq dalam operasi militer yang bernama Badai Gurun Padang Pasir/ *Dessert storm*.

Posisi Geografis Indonesia yang dibawah tepat Garis Khatulistiwa menempatkan posisi Indonesia dalam wilayah Tropis yang hanya merasakan dua jenis musim penghujan dan kemarau, sehingga di Indonesia bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Indonesia juga masih memiliki lebih dari 5.000 M3 air bersih per kapita per tahun. Dari sisi kepemilikan migas dan gas metana batu bara, sumur-sumur minyak, gas dan simpanan batu bara di hampir seluruh wilayah Indonesia telah diolah perusahaan perusahaan asing yang memiliki modal besar.

Perang Proxy telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis, militan IS/ISIS, Demonstrasi Massa, Hak Asasi Manusia, bentrok antar kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia di mulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum, merupakan contoh Perang Proksi yang nyata. Celah Timor tanpa diduga menyimpan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang fantastis. Australia pun ingin menguasai kandungan minyak di celah Timor dengan pembagian yang lebih besar. Setelah perjanjian celah Timor dengan Indonesia berakhir, Australia menggunakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyerukan perlunya penentuan nasib sendiri untuk rakyat Timor Timur. Dijalur diplomatik, Australia juga membujuk PBB untuk mengeluarkan sebuah Resolusi Dewan Keamanan agar mengizinkan pasukan Multinasional dibawah pimpinannya masuk ke Timor Timur dengan alasan kemanusiaan, menghentikan kekerasan dan mengembalikan perdamaian

Perang Proxi

Bertambah pesatnya populasi penduduk dunia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, air bersih, dan energi akan menjadi pemicu munculnya konflik-konflik baru. Pada 2013, British Petroleum (BP) mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa sisa energi fosil dunia

tinggal sekitar 40 tahun, sedangkan sisa energi fosil di Indonesia tinggal 16 tahun. Sehingga energi dunia akan habis pada 2053 dan Indonesia pada 2029 dengan asumsi bahwa kebutuhan energi dunia tidak meningkat. Padahal BP pada awal tahun ini memperkirakan bahwa konsumsi energi dunia pada 2035 meningkat sampai 41 persen dari kebutuhan hari ini.

Enam belas tahun lalu Amerika Serikat mengumandangkan perang Proksi melalui peristiwa 11 september 2001 yang menghancurkan gedung World Trade Center (WTC). Kejadian itu mengenalkan istilah terorisme mencuat dan populer di dunia internasional. Celakanya, terorisme dihubungkan dengan radikalisme Islam yang dianut oleh beberapa organisasi Islam, utamanya organisasi gerakan Islam jihadis Al Qaidah pimpinan Usamah bin Laden. Gerakan terorisme diartikan sebagai gerakan yang menginginkan perubahan secara radikal dengan cara kekerasan yang diinspirasi oleh keyakinan beragama. Tudingan ini tidak mudah disangkal karena realitanya banyak pelaku bom bunuh diri karena pemahaman keagamaan yang salah.

Sekedar pengamatan, di mana ada konflik negara yang melibatkan Barat dengan negara yang banyak berpenduduk muslim akan menyuburkan gerakan Islam Radikal yang kadangkala memicu terorisme. Seperti Daulah Islamiyah Iraq (DAI) yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya *Daulah Islamiyah fi al-Iraq wa al-Syam (islamic state in Irak and Syam*, ISIS) dalam bahasa Inggrisnya kadang disebut ISIL karena Syam diganti oleh kata Levant, dengan menggabungkan Syria, Irak, Yordania, Lebanon dan Wilayah Palestina.

Invasi Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara sekutunya ke Irak pada tahun 2003 dengan dalih mencari senjata pemusnah massal telah berhasil menumbangkan kekuasaan Saddam Husain, meskipun senjata itu tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Lebih aneh lagi, AS membuat pemerintahan yang di kuasai oleh Syi'ah. Celakanya, pemerintahan Syi'ah ini merepresi muslim Sunni dan berperilaku keras dan kejam terhadap para pejuang yang merupakan rakyat Irak sendiri.

Keadaan ini telah memancing kaum Sunni untuk melakukan perlawanan, sehingga mereka membuat kelompok perlawanan. Irak pun jatuh dalam perang saudara berdarah tahun 2006. Sejak itu, warga Irak terbelah berdasarkan agama, Sunni yang mayoritasnya tinggal di utara dan Syi'ah yang mayoritasnya di selatan.

Abu Mush'ab Al Zarfawi (Ada juga yang menyebut Abu Musa Al Zarqawi) adalah tokoh yang dikagumi oleh kelompok jihadis Irak. Ia merupakan figur dari kelompok pejuang Jihad wa Tauhid, sampai akhirnya AL Zarqawi meninggal dunia. Kemudian perjuangan rakyat Irak membentuk dewan syura dan selanjutnya mendeklarasikan Daulah Islam Iraq (DAIS). Dipilih sebagai pemimpinnya adalah Abu Umar al Baghdady. Abu Umar terbunuh dan digantikan oleh Abu Bakar Al Baghdady pada 15 Mei 2010

Saat memuncaknya pemberontakan terhadap Bashar al-Assad pada 2011, Al-Baghdady mengirim orang kepercayaan Abu Muhammad al-Ghalani untuk menyebrangi perbatasan dan membentuk afiliasi al-Qaeda di Suriah: Jabhah al-Nusrah. Kemudian pada tahun 2013 Al-Baghdady menginginkan Front al-Nusrah pimpinan al-Ghalani digabung di bawah kepemimpinan Al Baghdady dan dijadikan Daulah Islam Irak dan Syam / DAIS atau ISIS (Islamic State in Irak and Syam). Al-Ghalani menolak sehingga antara dua kelompok yang semula bersahabat menjadi bentrok.

DAIS terus melakukan ekspansi operasinya di Suriah pada 2012-2013 tanpa terpengaruh oleh perjuangan Jabhah Al-Nusrah. Bahkan mereka tidak hanya bertempur melawan pasukan Basyar al-Assad, tetapi juga berhadapan dengan kelompok-kelompok milisi anti-pemerintah lainnya, sehingga terjadi kekacauan dalam perjuangan rakyat Suriah. Para ulama yang netral dari berbagai negara mengambil inisiatif untuk mendamaikannya dengan membentuk mahkamah syariah untuk mengadili orang-orang yang bersalah ketika terjadi bentrok antar pejuang di Suriah. Semua kelompok menerima hal ini (pengadilan Mahkamah Syariah) kecuali ISIS dengan berbagai alasan.

Pimpinan Al-Qaeda pengganti Usamah bin Ladin, Syekh Ayman al-Zawahiri, mendukung faksi Suriah pimpinan al-Ghalani. Ketika Ayman Al Zawahiri (pemimpin Al Qaeda) meminta ISIS untuk kembali ke Irak dan hanya mengakui Jabhah al-Nusrah sebagai cabang resmi Al Qaeda di Suriah maka ISIS pun menolak, dan malah menuduh balik Al Qaeda juga para ulama yang selama ini menjadi rujukan para mujahidin seluruh dunia melakukan konspirasi.

Respon ISIS atas banyaknya penolakan dari para ulama terutama dari Al-Qaeda, kemudian mendeklarasikan Daulah Islam pada bulan Juni 2014 tanpa kata Irak dan Syam oleh jubah Daulah

Islam Di Iraq Dan Syam atau ISIS, Abu Muhammad Al-Adnaniy. Pendirian Khilafah dengan mengangkat Abdullah Ibrahim yang populer dengan julukan Abu Bakar Al Baghdady sebagai Khalifah. Deklarasi khilafah oleh ISIS ini ditentang para ulama di berbagai dunia karena dilakukan sepihak tanpa musyawarah ahlul halli wal aqdi (domain khilafah adalah seluruh dunia karena itu diperlukan musyawarah para ulama shaleh yang sudah dikenal kelurusan manhaj-nya oleh para mujahidin).

IS sangat berhasrat untuk mendirikan negara berdasarkan agama yang mereka kelola sendiri. IS sangat brutal dan radikal sehingga kelompok itu segera terlibat peperangan dengan hampir semua faksi lainnya dalam kalangan pemberontak Syuriah. Mereka menyerang dan membunuh anggota kelompok teroris lainnya. Di wilayah yang dikuasai, mereka mendirikan negara Islam dengan aturan yang sangat keras.

Di Indonesia, Deklarasi Khilafah Islamiyah mendapat sambutan dari sebagian kecil masyarakat. Menjadi heboh di Indonesia karena ada video ajakan bergabung (youtube) yang dilakukan oleh Bahrumsyah (Alumni UIN Jkt DO) asal Bogor dan dukungan yang ditunjukkan dengan cara bai'at, deklarasi dan simbol-simbolnya. Seperti pernyataan bai'at di lembaga pemasyarakat Nusa Kambangan dan beberapa tempat lainnya, deklarasi dukungan di Masjid Fathullah UIN Ciputat, 8 Feb 2014 oleh FAKSI, penggalangan dana, perayaan kemenangan ISIS, temuan gambar grafiti simbol ISIS, dan pemberangkatan kelompok Mujahidin.

Proxi War di Indonesia

Ancaman *Proxy war* sudah ada sejak Indonesia merdeka dari Belanda. Presiden Sukarno mengatakan bahwa akan ada banyak ancaman di berbagai lini di Indonesia. Dan semuanya dilakukan dengan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia telah berusaha untuk melarikan diri dari cengkeraman perang proksi. Seperti gerakan Non-Blok adalah salah satu bentuknya. Dengan tidak menguntungkan salah satu blok, maka tidak akan ada negara yang sengaja mengendarai Indonesia untuk kepentingan mereka.

Indonesia rentan dengan berbagai serangan dari luar melalui pihak ketiga non negara. Seperti organisasi kemasyarakatan, Lembaga Sosial Keagamaan dan perkumpulan. Selain itu masyarakat Indonesia masih goyah tentang komitmen persatuan dan kesatuannya. Sebab Indonesia memiliki

beberapa kelemahan yang mudah disusupi oleh pihak luar. *Pertama*, masyarakat Indonesia sangat heterogen. Memiliki banyak ras, etnis, dan agama yang bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. Karena perbedaan sudut pandang sering menjadi penyebab konflik yang dapat diperbesar secara bertahap. Kita mungkin memiliki kesatuan dalam keragaman, tetapi untuk mewujudkan cita-cita itu bisa dibilang sangat sulit, bahkan perjuangan yang tidak kecil.

Baru-baru ini kita disibukkan dengan perdebatan soal legalisasi Lesbi, Gay, Transgender, dan Transeksual (LGBT). Bahkan sedang berlangsung dan marak di daerah-daerah tentang benih-benih konflik antar paham keagamaan, seperti paham Syi'ah dan Wahabi, paham Hizbut Tahrir dan Banser Gerakan Pemuda Ansor, paham Libral dan paham radikal. Semua itu berpotensi digunakan oleh pihak luar untuk menyerang kekuatan negara sehingga terjadi pecah belah dan membuka pintu asing untuk intervensi dan mengeruk kekayaan Indonesia.

Kedua, Kemiskinan yang tergoda dengan kekuasaan. Banyak orang di Indonesia yang hidup dalam kesulitan. Kemiskinan di mana-mana, terutama di daerah yang menghasilkan sumber daya alam yang besar. Dari sini, pintu masuk negara atau kelompok tertentu untuk menciptakan organisasi pembebasan atau milisi. Mereka memberikan iming-iming kehidupan yang layak untuk membuat mereka semangat pemberontakan.

Ketiga, mudah terprovokasi dengan berita. Sebagian bangsa Indonesia mudah terprovokasi oleh isu-isu tertentu. Tidak sekali atau dua kali, bangsa ini gembira dengan isu-isu nyata palsu dan tidak layak dibahas. Perkembangan media sosial di Indonesia juga menjadi pemicu mengapa isu yang memprovokasi perpecahan sangat mudah berkembang biak di Indonesia.

Lebih buruk lagi, masyarakat Indonesia tidak memiliki budaya membaca yang baik. Berita apa saja mudah dengan segera dikonsumsi. Bahkan hanya dengan melihat judul headline “bengkok” langsung percaya. Padahal mencari tahu kebenaran dari suatu berita sangat penting. Mudah terseret provokasi dengan berita yang dimanipulasi oleh kelompok tertentu atau negara yang tujuannya untuk mendominasi Indonesia.

Mengangkal Proxi War

Cara menangkal perang proksi adalah memperkuat kesatuan masyarakat. Contoh paling nyata adalah strategi dakwah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw dan posisinya sebagai penengah antara beberapa suku dan kelompok di Madinah serta upaya mempersatukan mereka dalam wadah kebersamaan. Nabi Muhammad saw. telah mampu mengikat tali kerjasama antara kaum Yahudi, Kristen dan kaum muslim di Madinah. Ini ditandai dengan lahirnya perjanjian tertulis (Piagam Madinah) antara orang-orang muslim Muhajirin dan Anshar bersama kaum Yahudi dan sekutunya yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad saw. Dalam perjanjian tertulis itu, Nabi saw diakui sebagai pemimpin tertinggi dan sebagai *hakam* (penengah) bagi penandatanganan Piagam serta siapa saja yang bergabung dengan mereka.

Perjanjian yang terjadi antara Nabi Muhammad saw dengan komunitas-komunitas penduduk Madinah membawa mereka kepada kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir, atau dari keadaan zaman pra-negara yang disebut alamiah (*state of nature/status naturalis*) ke zaman bernegara di bawah kepemimpinan Nabi saw.

Dalam Mukaddimah Piagam Madinah terdapat Prinsip persatuan dan kesatuan sebagaimana termaktub dalam pasal 1, 15, 17, 25. Dalam pasal 1 menegaskan bahwa masyarakat Madinah adalah satu komunitas. Dalam pasal 15 memuat bahwa jaminan Allah SWT satu, yang sesama mukmin saling membantu. Dalam pasal 17 menjelaskan kesatuan antar umat Islam dalam perdamaian. Dalam pasal 25 menjelaskan bahwa seluruh penduduk Madinah, baik Yahudi maupun mukmin adalah satu rumpun. Perbedaan agama bukan penyebab membedakan antara mereka. Dalam pasal-pasal tersebut jelas bahwa antara penduduk Madinah satu tanpa membedakan etnis atau agama.

Prinsip persamaan dan keadilan termaktub dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, 40. Dalam pasal 13 memuat keadilan dan persamaan dalam rangka membasmi kezaliman meskipun terhadap anaknya sendiri. Pasal 15 persamaan hak bagi semua orang mukmin. Pasal 16 persamaan hak bagi orang Yahudi yang mengikuti umat mukmin. Pasal 22 dan pasal 23 menegaskan persamaan hak bagi umat mukmin dalam menjaga kesatuan dan semua urusan dikembalikan kepada Allah SWT dan Muhammad saw. Pasal 24 menjelaskan persamaan dalam kewajiban antara mukmin dan Yahudi. Pasal 37 menegaskan kesamaan kewajiban bagi kaum

mukmin dan Yahudi untuk menjaga komitmen yang termaktub dalam *shahifah*. Pasal 40 menegaskan persamaan hak bagi yang telah mendapat jaminan.

Prinsip bela negara termuat dalam pasal 24, 37, 38 dan 44. Dalam pasal 24 kewajiban mengeluarkan biaya perang dalam rangka bela negara. Dalam pasal 37 dan 38 menegaskan kewajiban warga masyarakat Madinah, baik Yahudi maupun muslim untuk mengeluarkan biaya dan membela konstitusi. Pasal 40 jaminan bagi warga yang tidak melakukan pengkhianatan. Semua ini secara tersurat dan tersirat menegaskan arti bela negara.

Sebenarnya Konstitusi Indonesia telah menganut Piagam Madinah. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar struktur negara. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bab XI UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Ketentuan UUD 1945 tersebut bertentangan dengan arah sekularisasi dan teokrasi homogen. Demokrasi menurut UUD adalah demokrasi Pancasila. Setiap sila dari lima sila, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Negara tidak memisahkan antara urusan agama dengan Negara. Urusan agama menjadi urusan resmin Negara seperti telah dibentuk Kementerian Agama. Maka demokrasi pun tidak lepas dari nilai-nilai agama, tetapi juga buka Negara agama.

Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Dari uraian di atas tampak adanya kesamaan konsep antara Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. Keduanya mengandung konsep kesamaan adanya ikatan agama dengan negara. Bahwa nilai-nilai transendental sangat berpengaruh terhadap rumusan dan isi keduanya. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa banyak mendasari dan mewarnai kalimat-kalimat isi keduanya.

Kebhinekaan tercermin dalam konstitusi sebelum Perubahan UUD 1945, ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap kebhinnekaan tertuang dalam jaminan terhadap kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan).

Pasca Perubahan UUD 1945, jaminan terhadap kebhinnekaan semakin jelas dan kuat, baik berupa hak individu, hak kolektif, maupun terhadap satuan pemerintahan. Ketentuan UUD 1945 yang menjamin kebhinnekaan dalam bentuk hak individu diantaranya adalah Pasal 28E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 28I Ayat (2); dan Pasal 29 Ayat (2). Pasal 28E Ayat (1) menjamin hak setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Pasal 28E Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E Ayat (3) menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28I Ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Khusus untuk kemerdekaan beragama dan beribadat, adalah jaminan terhadap kebhinnekaan dalam hal bergama. Hal itu ditegaskan dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Bahkan, dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Kebebasan untuk memeluk suatu agama dalam Piagam Madinah juga berlaku bagi Yahudi Bani al Najjar (pasal 26), Yahudi Bani al Najjar (pasal 27), Yahudi Bani Sa'idah (pasal 28), Yahudi Bani Jusyam (pasal 29), Yahudi Bani Aws (pasal 30), Yahudi Bani Tsa'labah (pasal 31), Jafnah Bani Tsa'labah (pasal 32), Yahudi Bani Syutaibah (pasa 33), Mawali Tsa'labah (pasal 34), orang-orang dekat atau teman kepercayaan kaum Yahudi (pasal 35).

Kesimpulannya

Perang proksi adalah sesuatu yang niscaya dalam persaingan hegemoni antar negara untuk mempertahankan kepentingan nasional. Banyak cara dan model yang dapat dilakukan guna secara diam-diam suatu negara dapat mengambil kekayaan alam negara lain. Bisa saja menggunakan kekuatan negara kecil, konflik internal negara, provokasi kelompok atau lembaga sosial masyarakat.

Indonesia sedang mengalami serangan perang proksi karena Indonesia kaya sumber daya alam dan letaknya yang strategis. Indonesia banyak potensi untuk diserang, baik melalui negara tetangga yang telah sering bergesekan dengan perbatasan Indonesia atau melalui potensi konflik yang ada di masyarakat, baik karena ketidakadilan ekonomi atau karena perbedaan paham keagamaan. Semua serangan perang proksi dapat dengan mudah ditangkal manakala masyarakat Indonesia bisa bersatu dan mau memegang teguh dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Intinya, kita perkokoh negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menuju kemaslahatan umat. Heterogenitas adalah keniscayaan, tetapi tetap dalam bingkai keteraturan yang taat kepada hukum dan kesepakatan. *Wallahu a'lam bisshawab*